



Judul : Harapan komisi VI DPR BUMN bermafaat bagi masyarakat
Tanggal : Selasa, 23 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Harapan Komisi VI DPR BUMN Bermanfaat Bagi Masyarakat

ANGGOTA Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto berharap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2026 makin kinclong menjadi lebih sehat, fokus, dan profesional. "Ke depan, BUMN harus fokus pada sektor yang menjadi kekuatannya," ujar Firnando dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

Menurut Firnando, setiap BUMN memiliki satu tujuan yang jelas dan berjalan pada jalur yang benar. Kebijakan *spin off* yang direncanakan Danantara akan menjadi kunci untuk mendorong BUMN agar lebih efisien dan kompetitif.

Diketahui, *spin-off* adalah proses sebuah unit bisnis atau divisi dari perusahaan induk dipisahkan menjadi entitas baru yang mandiri. Hal ini berbeda dengan divestasi, di mana unit bisnis dijual ke pihak lain.

Dengan struktur yang lebih ramping dan fokus, BUMN bisa meningkatkan kinerjanya, memperkuat daya saing, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. "Keberhasilan reformasi ini akan menentukan apakah BUMN dapat bertransformasi menjadi entitas bisnis yang modern dan berorientasi jangka panjang," kata politikus Golkar ini.

Selain itu, Firnando menekankan, masa depan BUMN akan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan di dalamnya. Diharapkan mulai 2026, pengangkatan direksi dan komisaris BUMN benar-benar mencerminkan prinsip profesionalisme dan meritokrasi.

Hal ini sejalan dengan OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, khususnya Chapter VI Principle VI.E dan Chapter II Principle II.F.

Isinya, penunjukan direksi dan komisaris harus berbasis kompetensi, pengalaman, integritas, dan dilakukan melalui proses yang transparan dan bebas dari intervensi politik.

Untuk itu, Firnando ingin BUMN tidak hanya dinilai dari besarnya aset atau laba semata. Tapi yang lebih penting adalah kualitas tata kelola, profesionalitas direksi dan komisaris, serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Komisi VI DPR akan terus mengawal reformasi ini agar menghasilkan BUMN yang sehat, efisien, dan mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. "Inilah arah BUMN ke depan, menjadi perusahaan negara yang profesional, fokus, dan benar-benar bekerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tandasnya.

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan menambahkan, proses merger BUMN harus memperhatikan asas keadilan, utamanya perlindungan tenaga kerja. Efisiensi dalam tubuh perusahaan plat merah itu tidak boleh diartikan sebagai pengurangan karyawan secara masif.

"Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali wajib mengambil langkah tegas agar merger BUMN tidak berdampak negatif terhadap stabilitas ketenagakerjaan nasional," kata Nasim dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

Nasim mengingatkan, PHK sebagai dampak merger BUMN hanya boleh dilakukan secara alami seperti pensiun, pengunduran diri sukarela, atau berakhirnya kontrak kerja. Pemerintah kudu menetapkan prinsip '*no layoff policy*' (kebijakan tanpa PHK) atau setidaknya '*no involuntary layoff*' (PHK paksa) dalam setiap dokumen. ■ TIF